

Tangkapan *layer entrain* data e-monev rencana aksi atas PK halaman pertama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW IV	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW IV	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RPJMD yang di jawab		Catatan Evaluasi Kemempnan RB
			PK	Renstra	Renja	Triwulan TW IV	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU					Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Menjelaskan Kendala (RM)	
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	95%	95%	95%	94,24%	Sesuai	Capaian KK 100%; Kurangnya KTP el 99,53%; KIA yang kompeten; 67,80; Akta Kelahiran anak 0-17 tahun 98,00; Akta Kematian 100%; Akta Perkawinan 100%	KIA yang kompeten; Tidak tersedianya pinjaman sarana untuk layanan mobile; Belum melaksanakan belanjanya penggunaan Buku Operator SIAC; Pokok Kematian; Melaksanakan Belu optimalnya pelatihan bagi Operator Desa; Secara aktif untuk penerbitan Akta Kelahiran; Ditjen Dukcapil Terbatasnya SDM terkait dan waktu untuk pelayanan daerah pemanfaatan terpendiri; Perseujuan permohonan	Mengajukan Telaahan Staf 874.359.100 83,77% layanan kelling; melaksanakan pelatihan permohonan	819.903.476 dari anggaran 874.359.100 (93,77%)	Indikator Kinerja lainnya target 95% (urusan pemerintah 99,20%)	94,24% dari - (99,20%)	-

Tangkapan *layer entrain* data monev rencana aksi atas LHE SAKIP SKPD

Search for something...

Home / Transaksi / LHE SAKIP

Periode: 2021 s/d 2026
Tahun: 2023

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi	File	Hapus
2021 s/d 2026	2023	73,85 (BB)	Perencanaan Kinerja 23,40; Pengukuran Kinerja 21,90; Pelaporan Kinerja 11,55; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 17,00	Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja; Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja; Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penetapan/penghapusan jabatan baik struktur maupun fungsional; Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) menginfokan; Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan secara triwulan; Melaksanakan perbaikan atas faktor hambatan pada Monev dilaksanakan dengan adanya peningkatan target pada Monev triwulan berikutnya; Menindak lanjuti rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya; Mengajukan permintaan revaluasi Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah	Akan dilakukan pembaruan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Tahun 2023; Melaksanakan perbaikan atas faktor Monev triwulan berikutnya; Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 nantinya akan dituangkan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Tahun 2021 dan Tahun 2022; Setelah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 selesai disusun nantinya akan langsung meminta Inspektorat dalam hal ini APIP untuk melakukan revaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas	Perencanaan kinerja : Progres 100%; Pengukuran kinerja : Masih dalam proses pertimbangan untuk penghapusan jabatan, Belum dilakukan karena belum disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023; Pelaporan Kinerja : PPTK terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan semaksimal mungkin. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Belum dilakukan karena belum disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.PDF	